

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Collaborative Governance hadir saat era paradigma *governance*, di mana pemerintah sedang menghadapi peningkatan kompleksitas masalah seiring dengan berkembangnya masyarakat. Pemerintah juga diketahui terbatas dari segi waktu dalam menangani isu-isu yang ada sehingga dibutuhkan adanya kerja sama dengan para aktor eksternal (Charalabidis et al., 2012: 264).

Ansel dan Gash (2007: 543) menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah strategi inovatif dalam pengelolaan pemerintahan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus. Ansell dan Gash juga menggambarkan *collaborative governance* sebagai sebuah pengaturan pengelolaan pemerintahan di mana proses penyusunan kebijakan bersama membuat institusi publik bekerja sama dengan aktor non-pemerintah dalam merancang atau menjalankan kebijakan publik, mengurus program, atau aset publik. *Collaborative governance* merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah.

Collaborative governance adalah alat yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan isu atau permasalahan. Konsep “kepemilikan bersama” yang diciptakan *collaborative governance* membuat *collaborative governance* disebut sebagai alat yang efektif dalam menghadapi masalah. Permasalahan yang ada dapat dilihat oleh perspektif yang lebih luas dengan hadirnya

aktor-aktor lain. Tidaklah sederhana untuk membangun pemahaman di antara berbagai peran aktor dalam merumuskan masalah (Ansell, 2014: 172).

Collaborative governance dikatakan bermanfaat dalam meraih tujuan bersama. Donahue dan Zeckhauser (2011: 4) mengemukakan bahwa situasi ketika pemerintah melibatkan kerja sama antar berbagai organisasi dan individu guna mencukupi kebutuhan publik disebut sebagai *collaborative governance*. Hal tersebut juga disampaikan oleh Holzer et.al., (2012: 349) yang mengungkapkan bahwa ketika hal yang ditujukan untuk masyarakat diupayakan oleh pihak pemerintah dan swasta, maka itu merupakan *collaborative governance*.

Situasi di mana aktor saling bergantung juga tergambar dalam *collaborative governance*. Keterbatasan yang dirasakan oleh para aktor membuat munculnya kemauan untuk melaksanakan *collaborative governance*. Setelah itu, para aktor harus menyampaikan kemauan dan kesiapan untuk membentuk ikatan yang lebih kuat dengan aktor lainnya. Setiap pihak harus menghormati otoritas atau keabsahan satu sama lain. Apabila komitmen untuk bekerja sama sudah terbentuk, maka harus dilanjutkan dengan menciptakan rasa kepemilikan terhadap setiap tahapan kolaborasi yang akan dilakukan (Ansell, 2014: 178).

Dari berbagai pernyataan yang dikemukakan para ahli, *collaborative governance* dapat disimpulkan sebagai proses interaksi formal dan informal dalam jaringan lintas sektor (*governments, private sector, civil society*) yang

ditujukan untuk menghasilkan konsensus dalam penyusunan dan pengembangan norma. Maka dari itu, interaksi dalam proses kerja sama ini bersifat egaliter, yang berarti seluruh aktor yang terlibat memiliki posisi yang setara.

Prinsip dan konsep tata kelola kolaboratif yang diterapkan di berbagai negara atau wilayah mempunyai banyak kesamaan. Perbedaan di antara ketiganya terletak pada cakupan geografis, tujuan, struktur, metodologi, dan hasil. Variasi-variasi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya ketika mengkaji kasus-kasus di tingkat kabupaten atau kota. Dinamika kepercayaan, komitmen, dan kewenangan antar pemangku kepentingan di setiap daerah selalu menunjukkan ciri khasnya. Faktor lokal tertentu dapat menyebabkan kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ketika mengkaji kasus-kasus tata kelola, tata kelola kolaboratif bertujuan untuk melihat pola praktik yang patut dicontoh dan praktik yang kurang optimal (Grey dkk., 2007).

Ansel dkk. (sebagaimana dimaksud dalam Tresiena et al., 2017) mendefinisikan beberapa kondisi penting untuk membangun teknik kolaboratif, antara lain: (1) Keterlibatan pemangku kepentingan; (2) Adanya situasi yang mendorong kesetaraan kekuasaan; dan (3) Adanya aktor yang mumpuni.

Salah satu isu penerapan *collaborative governance* misalnya dalam pengelolaan sampah. Sampah memiliki definisi sebagai hasil akhir atau limbah dari proses produksi yang berasal dari domestik (lingkungan rumah

tangga) ataupun industri. Dari Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dapat diketahui bahwa sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia atau proses alam yang berwujud padat atau semi-padat, dapat berupa zat organik atau anorganik yang mungkin dapat terurai atau tidak, dan tidak digunakan kembali sehingga dibuang ke lingkungan. Ditinjau dari sumbernya, terdapat berbagai lokasi yang menjadi asal sampah, seperti salah satunya adalah pemukiman penduduk yang umumnya berasal dari keluarga atau individu yang tinggal di rumah atau bangunan tertentu. Sampah yang berasal dari pemukiman penduduk umumnya bersifat organik, seperti sisa makanan, serta jenis sampah basah, kering, abu, plastik, dan sejenisnya. Lalu, terdapat sampah yang berasal dari area publik dan kegiatan perdagangan. Area publik dan perdagangan tentunya merupakan area yang memungkinkan untuk dikunjungi banyak orang dan dilakukannya berbagai kegiatan sehingga terdapat potensi yang besar untuk memproduksi sampah. Sampah yang berasal dari area publik dan perdagangan meliputi sisa makanan, buah dan sayuran yang membusuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, kaleng, dan jenis sampah lainnya.

Apabila dilihat dari sumbernya, terdapat 2 golongan sampah padat, yaitu 1) Sampah organik yang merupakan hasil dari materi-materi hayati dan dapat terurai oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Jenis sampah ini dapat secara alami teruraikan dengan mudah. Rumah tangga umumnya dominan dalam menghasilkan sampah organik, seperti limbah dapur, sisa makanan, kemasan (yang bukan terbuat dari kertas, karet, plastik), daun,

tepung, sayuran, dan kulit buah. Pasar tradisional juga tidak kalah dalam menghasilkan sampah organik; 2) Sampah non organik atau anorganik yang berasal dari materi non-hayati, baik produk sintetik maupun sisa proses teknologi ekstraksi bahan tambang. Sampah anorganik terbagi menjadi sampah logam dan produk hasil olahannya, plastik, kertas, kaca dan porseien, serta sampah detergen. Mayoritas sampah anorganik tidak terurai oleh alam atau mikroorganisme (*non-biodegradable*). Beberapa sampah anorganik lainnya membutuhkan waktu yang lama untuk teruraikan. Sampah berbahan plastik dan kaleng adalah contoh sampah anorganik yang biasa dijumpai di rumah tangga.

Permasalahan sampah di Indonesia merupakan isu yang mendesak dan memerlukan penyelesaian yang berkesinambungan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Banyaknya sampah yang tertimbun dan tidak dikelola akan melahirkan faktor utama pencemaran lingkungan, seperti menghasilkan aroma tidak menyenangkan dan tempat berkembangnya penyakit. Pembuangan sampah yang tidak terfasilitasi dengan baik membuat sampah akhirnya dapat mencemari lingkungan. Maka, dibutuhkan kemauan dan kesiapan dari pemerintah dan masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang efektif dalam menanggulangi sampah.

Tabel 1. 1 Jumlah Sampah Kota Semarang dari tahun 2019-2021

Bulan.	Banyaknya Sampah yang Terangkut per Bulan (M3)		
	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾
Januari	20 313	22 999	22 629
Februari	18 504	20 643	21 046
Maret	24 230	21 671	24 501
April	17 377	19 537	23 851
Mei	20 027	18 649	23 466
Juni	15 741	19 810	23 941
Juli	15 890	18 831	22 295
Agustus	16 010	19 544	22 723
September	16 943	19 229	22 164
Oktober	17 369	21 592	22 942
November	17 936	21 429	25 892
Desember	20 147	23 161	25 409
Jumlah	220 487	247 095	280 859

Sumber: semarangkab.bps.go.id

Jika melihat kasus sampah yang terjadi di Kota Semarang, dalam Tabel 1.1 menunjukkan bahwa setiap tahunnya sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. TPA Jatibarang memiliki luas 46 hektare yang terdiri dari 27,64 hektare untuk area buang, 4,6 hektare infrastruktur, 13,8 hektare kolam lindi, sabuk hijau, dan lahan cover. Peningkatan kuantitas sampah diikuti oleh total penduduk yang berkembang pesat. Kota Semarang mempunyai penduduk sekitar 275.361.267 jiwa. Total produksi sampah Kota Semarang yang tercatat oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang adalah 1.110 ton dalam sehari. Hal tersebut menunjukkan peningkatan produksi sampah Kota Semarang apabila dibandingkan pada saat awal pandemi yang memiliki total sampah 900 ton per hari. Permasalahan pengelolaan sampah semakin sulit diatasi karena Kota Semarang hanya memiliki satu lokasi akhir penampungan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang.

Isu sampah dapat menjadi lebih rumit apabila naiknya total produksi sampah tidak diiringi dengan upaya meningkatkan sarana dan

prasarana pengelolaan sampah. Dalam hal ini, jika kita melihat permasalahan sampah yang ada di Semarang yaitu TPA Jatibarang saat ini mengalami berbagai masalah yang mana sudah lama mengalami *overload*. Rata-rata sampah yang dibuang ke TPA Jatibarang mencapai 1.110-1.150 ton per hari. Meskipun Pemkot Semarang terus melakukan inovasi dalam pengolahan sampah di TPA, menciptakan listrik melalui gas yang dibentuk dari sampah, hal itu belum maksimal dapat menekan permasalahan sampah yang terjadi.

Salah satu cara Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi peningkatan sampah yang semakin menumpuk yaitu dengan adanya program Bank Sampah. Bank sampah merupakan lokasi pengumpulan sampah untuk selanjutnya dilakukan persortiran. Sampah yang telah disortir akan dialokasikan ke tempat pengolahan kerajinan dari bahan sampah atau tempat pengepul sampah. Bank sampah dijalankan dengan sistem yang menyerupai perbankan dan diurus oleh sukarelawan. Saat ini, terdapat 229 bank sampah yang berada di Kota Semarang. Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Barat, dan Pedurungan merupakan kecamatan yang paling banyak menyumbang sampah karena padatnya penduduk di kecamatan tersebut. Melalui bank sampah masyarakat bisa memilih dan memilah sampah sendiri. Dengan begitu sampah yang masuk ke TPS dan TPA bisa berkurang.

Seluruh pemangku kepentingan memiliki peran untuk membentuk kerja sama dalam pengelolaan sampah dengan adanya program bank

sampah. Bank Sampah Indria Jaya (BSIJ) adalah salah satu bank sampah di Kota Semarang yang telah melakukan kemitraan dengan pihak pemerintahan dan non pemerintahan. Bank Sampah Indria Jaya terletak di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Bank Sampah Indria Jaya (BSIJ) menjadi bank sampah pusat yang ada di Kelurahan Kalipancur Kota Semarang. Berdirinya bank sampah ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, serta akumulasi sampah yang menumpuk secara signifikan. Pada Desember 2016, Kelurahan Kalipancur mendapatkan kepercayaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan dibangunkanya bank sampah dan saat ini terus berkembang karena dukungan dari warga dan PT *Indofood* serta LSM Bintari. Dipilihnya Kelurahan Kalipancur karena bank sampah sudah lama diaplikasikan di setiap RT dan RW dari Kelurahan Kalipancur. Awal mula kolaborasi dilakukan merupakan inisiasi dari kepentingan Lurah Kalipancur Ibu Indriastuti dan pengurus bank sampah yang ingin memajukan Bank Sampah Indria Jaya karena menilai dari kualitas SDM, anggaran, dan sarana prasarana di Bank Sampah Indria Jaya belum memadai. Kemudian Pemerintah Kelurahan Kalipancur menilai bahwa komitmen yang ditujukan oleh pengurus Bank Sampah Indria Jaya sangat kuat sehingga Pemerintah Kelurahan Kalipancur memberikan kepercayaan dan membantu untuk menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pada tahun 2018 Bank Sampah Indria Jaya resmi mendapatkan dukungan kerjasama dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta, dan

masyarakat. Adanya bank sampah di Kelurahan Kalipancur memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat hingga saat ini, misalnya lingkungan Kalipancur terjaga kebersihannya, dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Jatibarang, sampah dapat diolah menjadi kerajinan, dan hasil penjualan sampah dapat memberikan pemasukan tambahan sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan Kalipancur. Terdapat 2 program Bank Sampah Indria Jaya yaitu Tukar Sampah dan Sedekah Jelantah. Kelurahan Kalipancur juga mendirikan unit-unit bank sampah di setiap RT/RW sehingga akomodir sampah dapat dikumpulkan di RT/RW nya masing-masing terlebih dahulu kemudian baru disalurkan ke pusat Bank Sampah Indria Jaya. Bank Sampah Indria Jaya juga memfasilitasi sistem penjemputan sampah untuk nasabah bank sampah yang memiliki kendala akses untuk datang langsung ke Bank Sampah Indria Jaya.

Keberhasilan Bank Sampah Indria Jaya dalam mengelola sampah di Kelurahan Kalipancur ini tidak lepas dari dukungan masyarakat Kalipancur itu sendiri yang mendukung program-program bank sampah. Bentuk dukungan masyarakat Kalipancur salah satunya yaitu dengan menjadi nasabah bank sampah sehingga setiap minggunya masyarakat dapat rutin menukarkan atau menjual sampah mereka ke bank sampah. Selain itu, terdapat dukungan dari pihak pemerintah dan swasta dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah dan juga

memberikan pelatihan kepada masyarakat seperti membuat kerajinan tangan dari sampah, ecobrick, ecoenzyme, dan lain sebagainya.

Menurut studi yang dilakukan oleh Sujiyanto (2016) di Bank Sampah Malang menyimpulkan bahwa pendirian dan operasional bank sampah dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung. Faktor pendorong dimulainya dan beroperasinya bank sampah meliputi aspek pemerintah, masyarakat, dan swasta (wirausaha). Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif melalui bank sampah memerlukan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan fokus dengan mengalokasikan tugas, wewenang, akuntabilitas, dan tanggung jawab lainnya di antara pihak-pihak yang terlibat.

Tujuan utama Bank Sampah adalah untuk berkontribusi dalam pengolahan sampah, meningkatkan kesadaran tentang menjaga lingkungan yang rapi, sehat, dan bersih, mengubah sampah menjadi produk yang bermanfaat secara sosial, dan tujuan serupa. Oleh karena itu, Bank Sampah merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang efektif dan ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat penyelenggaraan bank sampah di Kelurahan Kalipancur melibatkan banyak pemangku kepentingan, maka kajian mengenai *collaborative governance* menjadi menarik. Melalui kolaborasi antar

pemangku kepentingan, pengelolaan bank sampah di Kelurahan Kalipancur dapat beroperasi secara efisien dan bertahan lama. Mengacu pada penelitian yang dilakukan Andi Nur Qalby (2018) tentang *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Desa Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Bank Sampah Pusat), temuan tersebut menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah saat ini sudah berjalan di Desa Paropo. Proses ini menunjukkan keuntungan penting dalam hal inovasi berkelanjutan, sebagaimana dibuktikan dengan partisipasi warga yang besar dalam pengelolaan limbah. Namun, efektivitas pencapaian inovasi terhambat oleh permasalahan seperti kepercayaan yang rendah antar pemangku kepentingan, kurangnya pertukaran informasi dan komunikasi, yang mengakibatkan proses inovasi tidak seefektif yang diharapkan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fauziah Hanna (2018) mendalami analisis *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kabupaten Bandung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengelolaan bank sampah belum mencapai keberhasilan, terutama disebabkan oleh belum optimalnya faktor pengelolaan bank sampah di Kabupaten Bandung. Bidang-bidang yang memerlukan perbaikan mencakup komunikasi, pengambilan konsensus, penyelarasan tujuan, kepemimpinan, pembagian sumber daya, dan modal sosial, khususnya dalam konteks membangun kepercayaan.

Berdasarkan contoh penelitian terdahulu diatas ditemukan bahwa dalam *collaborative governance* yang dilakukan masih ditemukan berbagai

kelemahan. Hal serupa juga terjadi dalam kolaborasi di Bank Sampah Indria Jaya. Berdasarkan pengamatan awal pada penelitian ini, bukti praktis menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Desa Kalipancur belum mencapai potensi maksimal. Menurut Huxam dan Herbert, indikator kunci keberhasilan *collaborative governance* terletak pada pencapaian tujuannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, penyebab tidak tercapainya tujuan dari inisiatif *Collaborative Governance* Bank Sampah Indria Jaya adalah sebagai berikut:

Awalnya, muncul hambatan yang mempersulit penyelarasan beragam kepentingan menuju tujuan bersama. Meskipun kolaborasi dari berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan bank sampah, kenyataannya menunjukkan bahwa Bank Sampah Indria Jaya belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya ketidakselarasan tujuan antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan pemangku kepentingan lainnya. Ditetapkan konsensus bahwa pengelolaan sampah harus berbasis masyarakat, yang bertujuan untuk mengurangi sampah dan mengubah cara pandang masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah. Namun, sektor swasta yang terlibat dalam Bank Sampah Indria Jaya memiliki tujuan dan misi yang berbeda dibandingkan dengan pemerintah, dengan fokus utama pada perolehan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah.

Persoalan kedua berkisar pada kesulitan komunikasi antara DLH Kota Semarang dengan Bank Sampah Indria Jaya. Kolaborasi yang efektif

memerlukan informasi yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, namun masih terdapat kelemahan dalam menyebarkan informasi ini. Selain itu, terdapat tantangan juga mengenai keterlibatan aktif setiap pemangku kepentingan yang setara sebagai pelaksana kolaborasi dalam bank sampah. Akibatnya, kesadaran masyarakat Kalipancur masih rendah dan terbatas dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Melihat dan mencermati fenomena yang terjadi, maka peneliti ini ingin meneliti lebih jauh tentang *Collaborative governance* dengan mengambil judul **“Implementasi Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Bank Sampah Indria Jaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Bank Sampah Indria Jaya)?
2. Apa faktor-faktor keberhasilan dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* pengelolaan sampah di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Bank Sampah Indria Jaya)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Bank Sampah Indria Jaya).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor keberhasilan dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* pengelolaan sampah di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Bank Sampah Indria Jaya).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis dan Akademis

Temuan penelitian ini memiliki arti penting bagi kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan pengetahuan karena berkontribusi pada peningkatan pemahaman *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah dalam konteks Bank Sampah Indria Jaya yang terletak di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Informasi penelitian ini menjadi landasan untuk menilai pengaruh *Collaborative Governance* terhadap pengelolaan sampah di Bank Sampah Indria Jaya. Kemudian penelitian ini dapat berperan dalam merumuskan perbaikan kebijakan dan pelayanan publik di masa depan. Selain itu, terbukti bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam menyelidiki *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Desa Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

1.5 Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu ditujukan untuk menambah informasi serta menjadi bahan pembandingan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti lainnya. Tidak hanya itu, adanya penelitian terdahulu juga bisa dijadikan sebagai rujukan bagi penulis dalam penelitiannya. Penelitian terdahulunya yaitu:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/ Tahun	Judul	Metode	Hasil
1.	Andi Nur Qalby (2018)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat)	Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Desa Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, saat ini sudah berjalan dan menunjukkan kekuatan dalam proses inovasi yang sedang berlangsung, terbukti dengan banyaknya basis warga yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Namun, efektivitas pencapaian inovasi terhambat oleh tantangan seperti kurangnya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, kurangnya pertukaran informasi, dan kurangnya koordinasi, yang mengakibatkan proses inovasi menjadi kurang efektif dari yang diharapkan.

2.	Siti Jahro (2018)	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kiduldalem, KelurahanJogosari, dan Desa Prelet Kabupaten Pasuruan	Kualitatif	Hasil kajian mengungkap penerapan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan bank sampah yang berlangsung melalui tahapan penilaian, inisiasi, musyawarah, dan implementasi. Pengelolaan bank sampah di Kabupaten Pasuruan saat ini masih bersifat semi formal dan bergantung pada komitmen para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya kolaboratif.
3.	Ranti Meidita Lestari (2020)	<i>Collaborative Governance</i> antara pemerintah desa dalam pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu	Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif pada program cerobong sampah dan bank sampah di Desa Kramatwatu secara umum telah berhasil. Namun, salah satu aspek yang belum berjalan sesuai harapan adalah komitmen, hal ini terlihat dari indikator proses <i>Collaborative Governance</i> yang dipaparkan oleh Ansel dan Gash. Indikator-indikator ini mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara.
4.	Idris, Dian Herdian, Iqbal Miftakhul Muujtahid (2022)	<i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan sampah di Wilayah Kecamatan	Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pulau Tiga Barat relatif berhasil, terbukti

		Pulau Tuga Barat Kabupaten Natuna		dengan kondisi awal yang baik, proses kolaboratif yang berfungsi dengan baik, kepemimpinan yang fasilitatif, dan desain kelembagaan yang efektif. Namun, tantangan dalam proses kolaboratif masih ada, terutama dalam aspek keuangan, dimana terdapat keterbatasan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Pulau Tiga Barat.
5.	Devita Rizqi Hidayanti, David Efsitiendi (2020)	Praktik <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan sampah	Kualitatif	Penelitian penulis mengenai praktik <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan studi kasus pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta di TPA Piyungan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Dalam penerapan teori <i>Collaborative Governance</i> pada pengelolaan sampah di TPA Regional Piyungan, terdapat delapan indikator, dan tiga komponen—komitmen terhadap tujuan, pembagian informasi, dan sumber daya manusia—tidak terpenuhi. Di sisi lain, lima indikator—kepercayaan antar peserta, tata kelola, akses terhadap kekuasaan, pembagian akuntabilitas, dan jenis struktur jaringan—terpenuhi. Praktik tata kelola kolaboratif pemangku kepentingan dalam

				<p>pengelolaan sampah di TPA Piyungan dinilai kurang efektif, terbukti dengan belum lengkapnya pemenuhan teori ekologi politik dan teori pembangunan berkelanjutan. Dari teori-teori di atas, hanya dua indikator yang terpenuhi, yakni persoalan konflik lingkungan hidup dan munculnya gerakan-gerakan sosial.</p>
6.	A. Nur Chofifah (2022)	<p><i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan</p>	Kualitatif	<p>Dalam penelitian ini, menemukan bahwa pengelolaan sampah secara kolaboratif di Kabupaten Bone telah dijalankan melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meskipun masih terdapat kelemahan yang mencakup keterlibatan mereka hanya dalam aspek pengangkutan sampah.</p>
7.	Fauziah, Hanna (2018)	<p>Analisis <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan Bank Sampah di Kabupaten Bandung</p>	Kualitatif	<p>Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan bank sampah belum mencapai keberhasilan, dikarenakan beberapa faktor yang belum optimal dalam pengelolaan bank sampah di Kabupaten Bandung. Aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan melibatkan faktor komunikasi, pembuatan keputusan secara konteks, penetapan tujuan,</p>

				kepemimpinan, pembagian sumber daya, dan modal sosial dalam konteks kepercayaan.
8.	Andi (2021)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Sampah Pada Super Depo Suterejo Kota Surabaya	Kualitatif	Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa kerjasama antara pemerintah melalui DKRTH Kota Surabaya dan Nishihara Corp, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Super Depo Suterejo, telah mencerminkan komponen-komponen dalam model <i>Collaborative Governance</i> . Kerjasama tersebut meliputi dialog dan pertemuan bersama yang diadakan oleh DKRTH Kota Surabaya dan Nishihara Corp, membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, mendukung regulasi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemangku kepentingan terkait pengelolaan sampah, memerlukan kepemimpinan, dan memanfaatkan beberapa sumber daya seperti tenaga kerja, anggaran, dan fasilitas. Seiring berakhirnya proses kolaborasi, perubahan sistem pengelolaan sampah di Super Depo Suterejo dapat terlihat sebagai hasil yang diperoleh.
9.	Djogeh Harman, Ella L. Wargadinata, Ismail	Pengelolaan Sampah Berbasis <i>Collaborative Governance</i>	Kualitatif	Pengelolaan sampah yang menganut prinsip <i>Collaborative Governance</i> di Kota Tarakan mengalami kendala optimalisasi, yang

	Nurdin (2021)	Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara		disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, persetujuan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, karena perbedaan pandangan antara keduanya mengenai upaya perbaikan lingkungan. Misalnya, pihak swasta hanya menyediakan modal tanpa mengetahui bagaimana modal tersebut akan digunakan, sementara pelaksanaan, pengaturan, dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mengingat minimnya informasi mengenai pengelolaan sampah berbasis <i>Collaborative Governance</i> . Faktor internal yang menjadi kendala melibatkan fasilitas gerobak sampah yang masih kurang dan kapasitas daya tampung TPA yang terbatas. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi kendala termasuk kurangnya kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, kesadaran masyarakat yang rendah dalam pengelolaan sampah, dan tingkat kedisiplinan petugas pemungut sampah yang kurang memadai.
10.	Mulkhaeri Ikram (2020)	Pendekatan <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan	Kualitatif	<i>Collaborative Governance</i> yang melibatkan Pemerintah Kecamatan Manggala, Bank Sampah Sektor Manggala, Pegadaian, dan masyarakat,

		<p>Sampah Pada Bank Sampah Kecamatan Manggala</p>	<p>berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa faktor komunikasi saat ini tidak seoptimal pada periode sebelumnya, hal ini disebabkan oleh kondisi dan situasi saat ini yang mengharuskan untuk mengurangi kepadatan. Oleh karena itu, penyampaian program ini menjadi lebih bersifat komunikasi subjektif dari individu ke individu.</p> <p>Koordinasi antara pengelola bank sampah dan Pegadaian dalam hal pemeliharaan data administrasi terkait nasabah bank sampah dan pencatatan yang sudah ditimbang dikendalikan oleh agen Pegadaian yang tinggal di Kecamatan Manggala dan juga bertugas sebagai pengurus aktif Bank Sampah sektoral Manggala. Kepercayaan diakui sebagai faktor krusial, dan informan menyatakan bahwa perlu diperkuat karena tanpa saling kepercayaan, kolaborasi ini sulit untuk berhasil. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan oleh seluruh masyarakat.</p> <p>Selain kepercayaan, komitmen juga dianggap penting dan memerlukan</p>
--	--	---	---

				<p>konsistensi dari pihak-pihak yang berkolaborasi agar tetap mematuhi tugas dan tanggung jawabnya. Mereka juga diharapkan untuk tetap kreatif dan inovatif dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat agar tetap berpartisipasi dalam program <i>Gade Gold and Clean</i> ini. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, program ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah dan mengubahnya menjadi tabungan emas untuk masa depan masyarakat.</p>
11.	Hidayat Chusnul Chotimah (2021)	Model <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Maritim Di Kepulauan Seribu	Kualitatif	<p>Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi melibatkan serangkaian langkah, termasuk adanya dialog, pembangunan kepercayaan di antara pihak yang berkolaborasi, komitmen terhadap proses kolaborasi, pemahaman bersama mengenai tujuan yang ingin dicapai, dan hasil dari kolaborasi antar aktor dalam pengelolaan sampah plastik laut.</p>
12.	Yuyun Wahyudiantik (2013)	<i>Collaborative Governance</i> Pengolahan Limbah Sapi (Studi: Kolaborasi pemangku kepentingan dalam Pengolahan	Kualitatif	<p>Kolaborasi yang terjadi masih dalam format semi formal, tanpa adanya legitimasi atau perjanjian tertulis khusus untuk program biogas, meskipun telah diimplementasikan secara praktis. Tingkat komitmen dan kinerja dari setiap pemangku kepentingan</p>

		Limbah Sapi menjadi Biogas di Kabupaten Ngawi)		masih menunjukkan kekurangan. Sementara itu, hambatan yang muncul terkait dengan perbedaan pandangan, baik karena perubahan kebijakan maupun pergantian kepemimpinan, dan juga karena keterbatasan sumber daya finansial.
13.	Nova Apriani Bernadetta Hutagalung (2014)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Manajemen Promosi	Kualitatif	Kolaborasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah (melalui Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di 7 Kabupaten yang mengelola kawasan Danau Toba), sektor swasta (DMO dan PHRI), dan masyarakat di sekitar kawasan Danau Toba untuk mempromosikan pariwisata sudah dimulai. Namun, terdapat kelonggaran dalam pembagian peran kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat, sehingga setiap pemangku kepentingan memiliki jalur tindakan yang berbeda.
14.	Bagus Nuari Harmawan (2016)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui <i>Banyuwangi Ethno Carnival</i>	Kualitatif	Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Manajemen Jember <i>Fashion Carnival</i> dan Dewan Kesenian Blambangan dilakukan melalui serangkaian tahapan, termasuk dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, pembentukan komitmen, dan penyatuan pemahaman bersama. Hasilnya, kerjasama tersebut berhasil terwujud. Namun pelibatan faktor

				kebudayaan dan lembaga menjadi salah satu kendala dalam upaya membangun tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan Banyuwangi <i>Ethno Carnival</i> .
15.	Risza Darmayanti, Sri Susilih (2014)	Efektifitas Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah (Studi tentang Bank Sampah di Kecamatan Sukmajaya, Depok)	Kualitatif	Keefektifan pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat dinilai dengan mempertimbangkan lima indikator, yaitu kelembagaan, operasional, pembiayaan, peraturan/hukum, dan partisipasi masyarakat.
16.	Sujianto (2016)	Analisis Pengelolaan Bank Sampah di Bank Sampah Malang	Kualitatif	Adanya Bank Sampah dipicu oleh berbagai faktor, termasuk dukungan dari pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kontribusi dari sektor swasta (pengusaha).
17.	Prisia Ambar Shentika (2016)	Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo	Kualitatif	Kinerja bank sampah belum optimal karena program tersebut belum merata hingga ke daerah-daerah terpencil atau desa-desa. Kurangnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) serta Pemerintah Kota Probolinggo juga mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat di desa terkait pengelolaan sampah.
18.	Sugiana Desi Safitri, Sri	<i>Collaborative Governance</i> dalam	Kualitatif	Hasil penelitian ini mencakup analisis proses <i>Collaborative Governance</i> dengan

	Arum Wulansari Fatila (2019)	Pengelolaan Sampah		menggunakan teori Ansel dan Gash, sebagaimana yang dijelaskan dalam Islamy (2018:12). Pada awalnya, lokasi Bank Sampah Sejahtera hanya merupakan lahan kosong dengan tumbuhan pepohonan yang tidak dimanfaatkan. Desain kelembagaan dan peraturan dasar yang mengatur setiap proses kolaborasi di Bank Sampah Sejahtera didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan <i>Reduce, Reuse, dan Recycle</i> Melalui Bank Sampah. Kepemimpinan dalam proses ini secara langsung dikoordinasikan oleh Ketua Bank Sampah Sejahtera. Komunikasi antar aktor kolaboratif tata kelola dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Sejahtera sudah berjalan dengan baik. Namun permasalahan yang muncul di Bank Sampah Sejahtera adalah keterbatasan dana operasional yang diperlukan untuk mengembangkan rencana program baru.
19.	Iswanto (2020)	<i>Collaborative Governance</i> Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten	Kualitatif	Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi terhadap proses <i>Collaborative Governance</i> dalam penanganan sampah rumah tangga di Kabupaten Banyumas, sekaligus

		Banyumas		menganalisis hambatan-hambatan dan faktor-faktor pendukung dalam mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan masalah sampah di daerah tersebut. Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah memiliki tujuan dan inovasi untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Banyumas secara menyeluruh, dengan harapan tidak menimbulkan masalah di masa depan bagi generasi yang akan datang.
--	--	----------	--	---

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Penelitian sebelumnya dalam Tabel 2.2 dijadikan dasar kerangka berpikir oleh peneliti untuk menggambarkan isu penelitian. Terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama dalam fokus penelitian mengenai *collaborative governance*. Penelitian ini memiliki suatu hal yang sama juga berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Jika dilihat, penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki fokus penelitian yang sama, yaitu *collaborative governance* dan bank sampah. Sementara itu, hal yang membuat penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya adalah penekanan peneliti pada proses kerja sama, yakni pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat terkait pengolahan bank sampah. Penelitian ini berfokus pada tahapan *collaborative governance* oleh Morse dan Stephens (2012), mencakup *assessment, initiation, deliberation, dan implementation*. Selain itu, peneliti

ingin meneliti faktor-faktor keberhasilan mengacu pada teori Goldsmith dan Donald (2009: 135-136) tentang kriteria keberhasilan *collaborative governance*.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 *Collaborative Governance*

Dari segi bahasa, istilah "kolaborasi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*colabour*," yang artinya bekerja bersama. Dalam konteks bahasa publik, istilah ini merujuk pada suatu konsep dalam tata kelola yang sering dipakai dalam menggambarkan organisasi yang saling terkait dalam kegiatan publik, atau dengan kata lain, *Collaborative Governance* lebih mengacu pada pendekatan deliberatif dan berorientasi konteks dalam pengambilan keputusan. *Collaborative Governance* merupakan suatu model kontrol di mana satu atau lebih lembaga publik terlibat secara langsung dengan para pemangku kepentingan non-negara dalam proses formal pengambilan keputusan yang bersifat konteks, bersifat deliberatif, dan ditujukan untuk menciptakan dan menerapkan kebijakan publik, mengurus program publik, atau merawat aset publik.

Banyak definisi kolaborasi yang disampaikan oleh para ahli dengan perspektif yang berbeda. Menurut Ansell dan Gash (dalam Febrian, 2016), *Collaborative Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem di mana lembaga-lembaga publik terlibat langsung terlibat dengan pemangku kepentingan di luar sektor publik dalam

proses penentuan konsensus yang bersifat formal, berorientasi pada konteks, dan musyawarah. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menciptakan atau mengaplikasikan kebijakan publik, atau mengelola program dan aset publik. Dalam konteks kolaborasi, terdapat kesamaan visi, tujuan, strategi, dan aktivitas di antara berbagai pihak, walaupun pihak-pihak yang dilibatkan tentu mempunyai keputusan untuk menentukan keputusan tanpa pengaruh dari pihak lain (Putri, 2021).

Menurut Donahue dan Zeckhauser (2011), *Collaborative Governance* Merujuk pada kondisi di mana pemerintah bekerja sama dengan organisasi atau individu lain untuk mencapai tujuan publik. Pengertian lain dari *Collaborative Governance*, seperti yang disampaikan oleh Holzer et al. (2012), adalah kondisi di mana sektor publik dan swasta bersatu untuk mencapai tujuan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat.

Definisi *collaborative governance* di atas, menurut Ansel dan Gash (2007:544-545), menekankan pada enam kriteria penting, yaitu:

- a) Institusi pemerintah atau lembaga publik merupakan inisiator forum ini;
- b) Forum mencakup pihak-pihak non-pemerintah sebagai peserta;

- c) Partisipan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan serta bukan hanya bersifat konsultatif terhadap lembaga publik.
- d) Forum ini diorganisir dengan resmi serta memenuhi unsur-unsur kolektif;
- e) Tujuan utama forum adalah mencapai keputusan melalui konteks, meskipun dalam praktiknya konteks tidak selalu tercapai;
- f) Fokus kolaborasi difokuskan kepada manajemen publik atau kebijakan publik.

Menurut Tresiena (2016:33) mengkompilasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu:

- a) Partisipasi dari para pemangku kepentingan menjadi kunci. Partisipasi yang sebenarnya mencerminkan kekuasaan warga seperti yang dijelaskan dalam tingkat partisipasi oleh Arnstein.
- b) Terdapat kondisi di mana setiap pihak memiliki kesetaraan kekuasaan. Ini berarti tidak ada dominasi dari pihak tertentu, dan setiap aktor yang terlibat dalam dialog bebas dari hambatan hirarki dengan adanya rasa saling menghormati.
- c) Terlibat aktor-aktor yang kompeten. Dialog yang berlangsung merupakan bentuk komunikasi yang mengarah pada konteks, sehingga kehadiran aktor yang mendukung

menjadi esensial. Hal ini berarti mereka memiliki kompetensi dalam berkomunikasi, memahami substansi permasalahan, dan memiliki orientasi untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam implementasi kolaborasi governance, Morse dan Stephens (2012:567, 576) menetapkan tahapan penilaian, inisiasi, musyawarah, dan implementasi. Berikut adalah tahapannya:

Gambar 1. 1 Tahapan Proses Collaborative Governance

No	Assessment	Initiation	Deliberation	Impelementation
1	<i>Is collaboration necessary?</i>	<i>How to frame the issue?</i>	<i>How to develop effective working group?</i>	<i>Who will do what?</i>
2	<i>Are preconditions in place?</i>	<i>How to engage stakeholders?</i>	<i>What ground rules?</i>	<i>How to broaden support?</i>
3	<i>Who are the stakeholders?</i>	<i>Who/what else is needed?</i>	<i>How to invent options and decide?</i>	<i>What kind of governance structure?</i>
4	<i>Who might fill key roles (sponsor, convener, and facilitator)?</i>	<i>What kind of process?</i>	<i>How to facilitate mutual learning?</i>	<i>How to monitor progress?</i>

Sumber: *Teaching Collaborative Governance: Phase, Competesis, and Case-Based Learning.*” *Journal of Public Affairs Education.* 2012: 567

Langkah awal pada proses kolaborasi yaitu tahap penilaian (*assessment*). Pada tahap ini, dijelaskan kondisi awal yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan kolaborasi antara para pemangku kepentingan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam proses ini yaitu sebagai berikut:

- a) Mendapatkan pemahaman faktor-faktor kontekstual seperti kerjasama sejarah, insentif kelembagaan, atau hambatan kerjasama (Ansell dan Gash, 2008; Bryson et al., 2006, dalam Morse dan Stephens, 2012:568);

- b) Mengidentifikasi pemangku kepentingan (Chrislip, 2002; Gray, 1989; Linden, 2010; Luke, 1998, seperti dijelaskan dalam Morse dan Stephens, 2012:568);
- c) Disepakati kesepakatan umum mengenai masalah atau tujuan bersama yang akan dicapai (Bryson et al., 2006; Gray, 1989; Linden, 2010, seperti dijelaskan dalam Morse dan Stephens, 2012:568); dan
- d) Memiliki rasa urgensi atau komitmen untuk melaksanakan kolaborasi demi menciptakan solusi (Linden, 2010, seperti dijelaskan dalam Morse dan Stephens, 2012:568).

Tahap penilaian bertujuan untuk menentukan apakah kerja sama dibutuhkan dan dapat dilakukan atau tidak. Setelah menyelesaikan tahap penilaian, langkah selanjutnya adalah tahap inisiasi. Tahap ini melibatkan identifikasi penyelenggara dan peran sponsor sebagai sumber daya manusia dan dana. Prosesnya mencakup rapat pemangku kepentingan untuk membentuk kelompok kerja dalam desain (Carlson, 2007; Chrislip, 2002; Gray, 1989; Luke, 1998, dalam Morse dan Stephens, 2012:568). Tahap inisiasi berfokus pada keterampilan interpersonal penyelenggaraan kerja sama, membangun kolaborasi, dan membentuk tim (Alexander, 2006, dalam Morse dan Stephens, 2012:568).

Setelah tahap inisiasi berhasil membangun komitmen antara para pemangku kepentingan untuk bekerja sama, langkah

berikutnya adalah tahap musyawarah (musyawarah). Tahap ini melibatkan kegiatan pembuatan aturan dasar atau peraturan dasar (Gray, 1989; Luke, 1998, seperti dijelaskan dalam Morse dan Stephens, 2012:568). Langkah berikutnya adalah melangsungkan diskusi dan dialog sebagai proses pembelajaran bersama yang diharapkan dapat menciptakan dan menemukan berbagai opsi (Carlson, 2007; Chrislip, 2002; Gray, 2008, seperti dijelaskan dalam Morse dan Stephens, 2012:568). Akhirnya, tahap musyawarah mencapai kesepakatan kolaboratif atau perjanjian kerjasama (Carlson, 2007; Chrislip, 2002; Gray, 1989; Luke, 1998, seperti dijelaskan dalam Morse dan Stephens, 2012:568).

Tahapan akhir dalam pengembangan *Collaborative Governance* adalah implementasi yang mencakup berbagai kegiatan seperti:

- a) Menyusun struktur pemerintahan (*governance*) (Ansell dan Gash, 2008; Bryson et al, 2006; Gray, 1989; Luke, 1998, seperti dijelaskan dalam Morse dan Stephens, 2012:569);
- b) Membangun dukungan dari konstituen (Chrislip, 2002; Gray, 1989; Linden, 2010; Luke, 1998, seperti dijelaskan dalam Morse dan Stephens, 2012:569); dan
- c) Melakukan pemantauan terhadap perjanjian atau kesepakatan, menghasilkan hasil, dan mengelola kerjasama (Chrislip, 2002;

Gray, 1989; Luke, 1998, seperti dijelaskan dalam Morse dan Stephens, 2012:569).

Tahapan ini adalah tahap kritis yang dapat menentukan kelangsungan atau pencerahan kolaborasi ketika muncul permasalahan yang menghambat kelangsungan kerjasama. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan secara rinci setiap tahapan *Collaborative Governance* untuk mengilustrasikan proses kerja sama antar pemangku kepentingan dalam melakukan proses kelola Bank Sampah Indria Jaya di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Beberapa aspek kunci dapat dijadikan indikator untuk mewujudkan keberhasilan suatu kolaborasi dalam ranah pemerintahan, menurut Goldsmith dan Donald (2009: 135-136) sebagai berikut:

a) *Networked Structure* (Struktur Jaringan)

adalah hubungan antara satu elemen dengan elemen lainnya, dengan cara bersama-sama, mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang dikelola. Dalam konteks pemerintahan kolaboratif, penting bahwa elemen jaringan tidak menunjukkan sifat hierarki kekuasaan, dominasi, atau monopoli. Sebaliknya, elemen jaringan harus memiliki struktur organisasional yang melibatkan semua pihak dengan

hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan aksesibilitas yang setara dalam mencapai tujuan bersama.

b) *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen untuk Tujuan Bersama)

Menjadi alasan pentingnya sebuah network, hal ini dikarenakan komitmen tersebut memiliki tujuan yang akan dicapai bersama. Pada dasarnya, misi umum organisasi pemerintahan akan memuat tujuan tersebut. Di samping itu, keberpihakan kepada salah satu pemangku kepentingan tidak boleh terjadi dalam komitmen yang terbentuk. Maka, komitmen yang dibentuk dalam kerjasama ini mencakup kejelasan visi dan misi di setiap lembaga, serta setiap lembaga memiliki tekad sendiri untuk memberdayakan suatu kelompok.

c) *Trust Among The Participants* (Kepercayaan di antara Peserta)

Merupakan keyakinan dalam hubungan professional yang terbentuk apabila para partisipan percaya dengan informasi atau upaya para pemangku kepentingan lainnya dalam meraih tujuan bersama. Maka, yang dibutuhkan pada proses kolaborasi ini adalah perasaan percaya pada seluruh pemangku kepentingan sehingga pemerintahan kolaboratif dapat meraih keberhasilan.

d) *Governance* (Pemerintahan)

Tata kelola pemerintahan dapat dianggap sebagai tata kelola (*governance*) jika terdapat kejelasan mengenai siapa yang termasuk sebagai anggota dan siapa yang bukan anggota.

e) *Distributive Accountability atau responsibility* (Pembagian Tanggung Jawab)

Melibatkan pengelolaan dan pengaturan manajemen yang dilakukan secara bersama-sama antara para aktor, dengan keputusan pembagian kepada semua anggota dan tanggung jawab bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada dasarnya, dalam pemerintahan kolaboratif, perlu ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara para pemangku kepentingan, dan kebijakan pembuatan keputusan harus melibatkan setiap pemangku kepentingan.

f) *Information Sharing* (Berbagi Informasi)

Hal ini mencakup kemudahan akses bagi para anggota pemangku kepentingan, perlindungan privasi, dan akses independen bagi mereka yang bukan anggota, selama dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, dalam pemerintahan kolaboratif, penting untuk ada pembagian informasi yang transparan dan mudah diakses agar dapat diterima oleh setiap aktor yang terlibat.

g) *Access to Resources* (Akses Sumber Daya)

Ini melibatkan ketersediaan sumber daya keuangan, manusia, teknis, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan jaringan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kolaborasi, penting untuk memiliki kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi setiap pemangku kepentingan yang terlibat.

1.7 Definisi Operasional

Collaborative Governance merupakan suatu proses kerja sama yang melibatkan berbagai pihak di dalam negara, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah, pemerintah bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab, tetapi pihak swasta dan masyarakat turut memiliki peran. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah, khususnya di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang diwujudkan dalam bentuk Bank Sampah Indria Jaya. Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat menjadi penting untuk melengkapi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah tersebut.

Dalam penerapan serta pelaksanaan *collaborative governance* tentunya sesuai dengan tahapan proses *collaborative governance* yaitu *assessment, initiation, deliberation, dan implementation*. Kemudian, terdapat 7 kriteria keberhasilan *collaborative governance* yaitu *networked structure, commitment to a common purpose, trust among the participants,*

governance, distributive accountability/responsibility, information sharing, access to resources.

Tabel 1. 3 Tahapan Proses dan 7 Kriteria Keberhasilan *Collaborative Governance*

Tahapan Dalam Proses <i>Collaborative Governance</i>		
Konsep	Dimensi	Indikator
<i>Assessment</i> (Penafsiran)	Kondisi awal ini memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan kondisi kolaborasi antara pemangku kepentingan.	Memahami faktor-faktor kontekstual seperti sejarah kerjasama, pemahaman atas sumber masalah, penentuan apakah pendekatan kolaborasi merupakan solusi yang tepat.
<i>Initiation</i>	Membangun komitmen dan kerjasama antar <i>stakeholder</i> .	Pembentukan/pengenalan kelompok yang akan terlibat dalam proses kolaboratif. Adanya forum dimana masing-masing pemangku kepentingan berpartisipasi dalam forum tersebut.
<i>Deliberation</i>	Musyawarah dan dialog kerja sama antar <i>stakeholder</i> .	Diskusi dan negosiasi antara pemangku kepentingan yang terlibat. Tujuannya adalah mencapai pemahaman bersama tentang isu tersebut, mengidentifikasi solusi potensial, dan merancang rencana tindakan bersama.
<i>Implementation</i>	Pelaksanaan proses kolaborasi oleh masing-masing <i>stakeholder</i> .	Penerapan tindakan yang telah disetujui oleh semua pihak yang

		terlibat merupakan langkah selanjutnya dalam proses ini. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan juga dapat diterapkan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil menghasilkan hasil yang diinginkan.
7 Kriteria Keberhasilan Collaborative Governance		
Konsep	Dimensi	Sub Indikator
<i>Collaborative Governance</i>	<i>Networked Structure</i> /Struktur Jaringan (Hubungan antar elemen yang saling menonjolkan elemen fisik dari jaringan yang diatur, tanpa menciptakan hirarki kekuasaan dari salah satu pihak yang terlibat dalam kolaborasi, mencerminkan keterkaitan antar elemen tersebut)	Adanya kolaborasi yang terjalin antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam hubungan satu dengan lainnya tidak saling membawahi (hirarki) atau lebih berkuasa/mendominasi satu atas yang lainnya.
	<i>Commitment to a Common Purpose</i> /Komitmen Terhadap Tujuan (Jaringan yang dibentuk harus memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan organisasi dan tidak boleh bersikap memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam kolaborasi)	Memiliki pemahaman yang sama dan kesepakatan dalam upaya untuk mencapai tujuan. Misal sudah memahami kenapa mereka harus berkolaborasi.
	<i>Trust Among The Participants</i> /Kepercayaan (setiap pemangku kepentingan harus memiliki kepercayaan satu sama lain sebagai wujud dari hubungan profesional yang telah terjalin.)	Masing-masing pemangku kepentingan menjalankan fungsinya dengan baik.
	<i>Governance</i> (Tata Kelola dapat dikatakan <i>governance</i> apabila dapat	Terdapat Transparansi, Akuntabilitas, dan

	dipisahkan mana yang terlibat dan tidak terlibat)	Partisiapasi.
	<i>Distributive Accountability/Responsibility</i> /Pembagian Akuntabilitas (Pembagian tanggung jawab harus terdefinisi dengan jelas, dan setiap pemangku kepentingan harus terlibat dalam proses pembuatan Keputusan)	Terdapat pemangku kepentingan yang responsif.
	<i>Information Sharing</i> /Berbagi Informasi (Hal ini melibatkan pembagian informasi secara transparan dan memberikan kemudahan akses informasi kepada setiap pemangku kepentingan)	Tidak terbatasnya informasi.
	<i>Access to Resources</i> /Akses terhadap Sumber Daya (Hal ini mencakup kejelasan dan ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun materi, bagi setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi)	Terdapat SDM, Sumber daya Uang, Sumber daya sarana prasarana yang memadai.

Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.8 Kerangka Teori

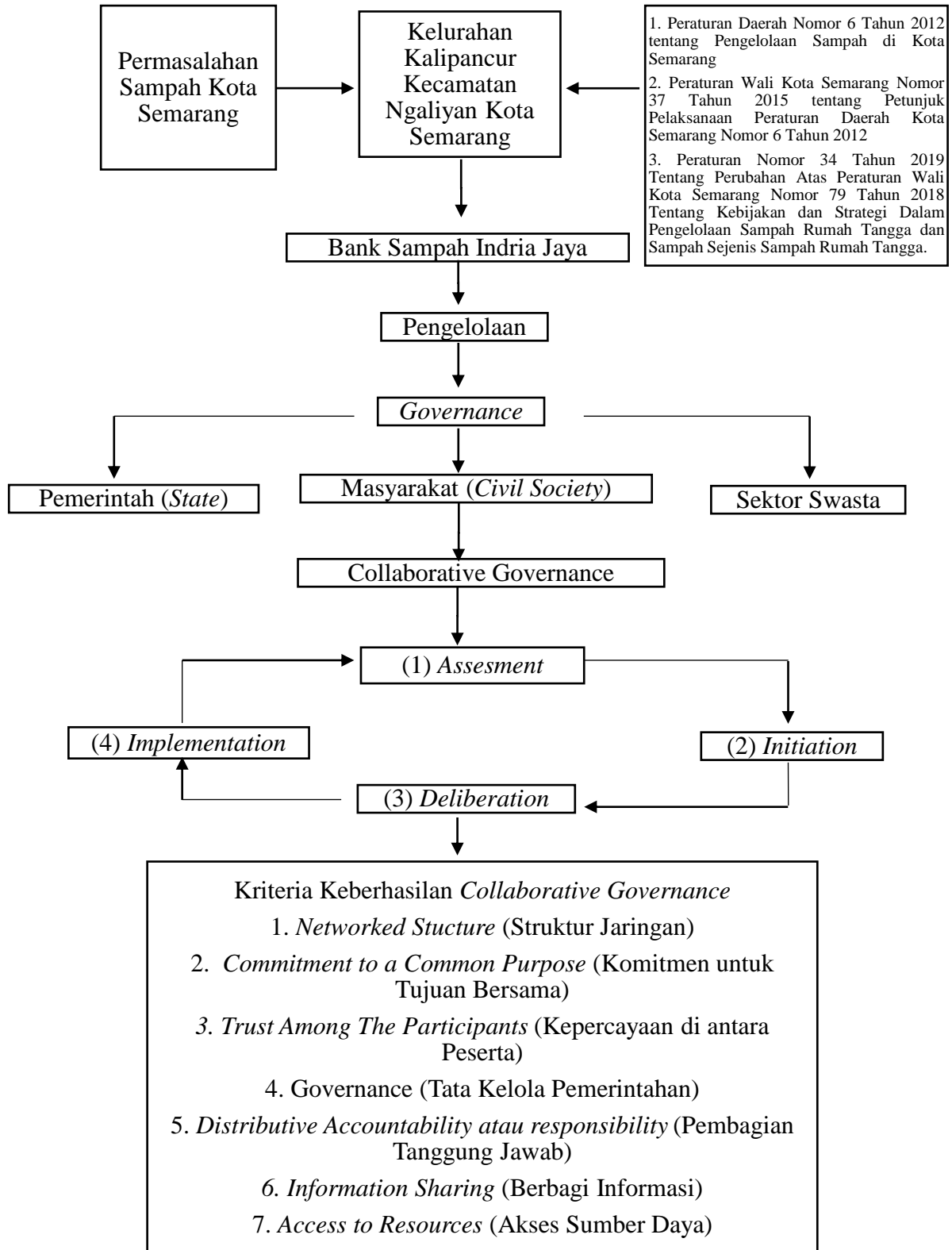
Kerangka pemikiran digunakan sebagai landasan atau dasar dalam pengembangan konsep-konsep dari teori yang diterapkan dalam penelitian, serta kaitannya dengan pembahasan masalah.

Pemerintah memegang peran utama dalam mengelola sampah, yang melibatkan upaya untuk mendorong aktivitas sektor sehingga lingkungan kondusif untuk pengelolaan sampah dapat terbentuk di suatu wilayah. Pedoman yang dipakai dalam proses kolaborasi ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota

Semarang; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012; dan Peraturan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengacu pada konsep kolaborasi, kolaborasi adalah suatu usaha untuk menggabungkan sektor-sektor dari pemerintah dan non-pemerintah, dengan tujuan mengelola, menata, dan mengatur berbagai aspek bersama untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Dalam konteks penelitian ini, fokus akan diarahkan pada tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Indria Jaya, yang berlokasi di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Kerjasama dalam pengelolaan sampah ini melibatkan Kelurahan Kalipancur, Dinas Lingkungan Hidup Semarang, Yayasan Bintari, dan PT *Indofood* CBP Sukses Makmur Tbk Division Cabang Semarang. Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Kerangka Teori



Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Satori dan Komariah (2014:23), penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan pertanyaan dasar mengenai apa, bagaimana, siapa yang terlibat, kapan, dan di mana kejadian tersebut terjadi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut memberikan gambaran rinci tentang tahapan proses kolaborasi serta faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan Bank Sampah Indria Jaya di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

1.9.2 Situs dan Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kelurahan tersebut merupakan obyek yang relevan untuk mengkaji *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Pusat perhatian penelitian ini diarahkan untuk memberikan batasan yang jelas kepada peneliti dalam mengumpulkan data. Proses pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan sesuai tujuan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada tahapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah, yaitu penilaian, inisiasi, deliberasi, dan implementasi di Bank Sampah

Indria Jaya, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, serta menganalisis kriteria-kriteria keberhasilan *collaborative governance* yaitu *networked structure, commitment to a common purpose, trust among the participants, governance, distributive accountability/responsibility, information sharing, access to resources*.

1.9.1 Data Penelitian

Idrus (2009:61) mendefinisikan data sebagai segala keterangan atau informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor penelitian seperti subjek penelitian, informan, atau pelaku, serta dari aktivitas dan tempat yang menjadi fokus penelitian. Sumber data merujuk pada asal usul di mana peneliti memperoleh data. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa sumber dan observasi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti mencari data mengenai proses *collaborative governance* dan faktor-faktor keberhasilan *collaborative governance* pengelolaan bank sampah di Bank Sampah Indria Jaya melalui wawancara kepada objektif penelitian di Pemerintahan Kelurahan Kalipancur, Bank Sampah

Indria Jaya, Yayasan Bintari, dan PT *Indofood*. Berikut tabel sumber data primer yang telah didapatkan setelah melakukan penelitian:

Gambar 1. 3 Sumber Data Primer

No.	Sumber Data	Data primer yang diperoleh
1.	Dinas Lingkungan Hidup Semarang	<ul style="list-style-type: none"> a) Gambaran umum Bank Sampah di Kota Semarang b) Sosialisasi yang pernah dilakukan terkait pengelolaan sampah c) Sarana prasarana yang pernah diberikan kepada pengelola bank sampah d) Tata cara pengelolaan bank sampah secara umum
2.	Lurah Kelurahan Kalipancur	<ul style="list-style-type: none"> a) Sejarah kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kalipancur b) Sejarah berdirinya Bank Sampah di Kelurahan Kalipancur c) Tujuan dibentuknya Bank Sampah di Kelurahan Kalipancur d) Kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan dan sampah yang pernah dilakukan oleh Bank Sampah Indria Jaya e) Kerjasama yang pernah dilakukan dengan CSR. f) Kegiatan monitoring dan evaluasi yang pernah dilakukan Pemerintah Kelurahan Kalipancur terhadap Bank Sampah Indria Jaya
3.	Staff Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> a) Gambaran umum dan profil Kelurahan Kalipancur b) Kondisi lingkungan Kelurahan Kalipancur c) Sejarah berdirinya Bank Sampah Indria Jaya d) Peran Pemerintah Kelurahan dalam pengelolaan Bank Sampah Indra Jaya
4.	Ketua Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none"> a) Gambaran umum dan profil

		<p>Kelurahan Kalipancur</p> <p>b) Kepengurusan Bank Sampah Indria Jaya</p> <p>c) Kegiatan operasional Bank Sampah Indria Jaya</p> <p>d) Sejarah berdirinya Bank Sampah di Kelurahan Kalipancur</p> <p>e) Kondisi Bank Sampah di Kelurahan Kalipancur saat ini</p> <p>f) Kegiatan yang pernah dilakukan pengelola bank sampah dengan kepala Kelurahan Kalipancur</p> <p>g) Permodalan Bank Sampah di Kalipancur</p> <p>h) Kendala yang menghambat pengelolaan Bank Sampah Indria Jaya</p>
5.	PT <i>Indofood</i> Cabang Semarang	<p>a) Sejarah kolaborasi antara Kelurahan Kalipancur, Dinas Lingkungan Hidup Semarang dengan PT <i>Indofood</i> Cabang Semarang</p> <p>b) Peran PT <i>Indofood</i> Cabang Semarang dalam pengelolaan Bank Sampah Indria Jaya</p> <p>c) Kegiatan yang pernah dilakukan PT <i>Indofood</i> Cabang Semarang dengan Bank Sampah Indria Jaya</p>
6.	Yayasan <i>Bintari Foundation</i>	<p>a) Sejarah kolaborasi antara Kelurahan Kalipancur, Dinas Lingkungan Hidup Semarang dan PT <i>Indofood</i> Cabang Semarang dengan Yayasan <i>Bintari Foundation</i></p> <p>b) Peran Yayasan <i>Bintari Foundation</i> dalam pengelolaan Bank Sampah Indria Jaya</p> <p>c) Kegiatan atau program yang pernah dilakukan Yayasan <i>Bintari Foundation</i> dengan Bank Sampah Indria Jaya</p>
7.	Pengepul Sampah	<p>a) Sejarah kerja sama pengepul dengan Bank Sampah Indria Jaya</p> <p>b) Kegiatan pengambilan sampah di Bank Sampah Indria Jaya</p> <p>c) Perjanjian harga sampah</p>

8.	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a) Sejarah berdirinya Bank Sampah Indria Jaya b) Kondisi Lingkungan Kelurahan Kalipancur dengan adanya Bank Sampah Indria Jaya c) Kepercayaan dan kepuasan masyarakat dengan adanya Bank Sampah Indria Jaya d) Manfaat yang diterima masyarakat dengan adanya Bank Sampah Indria Jaya e) Kendala dan keluhan masyarakat terkait kinerja Bank Sampah Indria Jaya
----	------------	---

Sumber: Diolah oleh Peneliti

b) Data Sekunder

Data sekunder berperan sebagai pendukung data primer dalam penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi. Sumber data ini selanjutnya digunakan sebagai pelengkap dalam memberikan keterangan dan bahan perbandingan. Berikut tabel sumber data sekunder yang telah didapatkan setelah melakukan penelitian:

Gambar 1. 4 Sumber Data Sekunder

No.	Sumber data	Data sekunder yang diperoleh
1.	Pemerintahan Kelurahan Kalipancur	<ul style="list-style-type: none"> a) Peta Kelurahan Kalipancur b) Data penduduk Kelurahan Kalipancur c) Dokumentasi kegiatan-kegiatan bank sampah di Kelurahan Kalipancur
2.	Sekretaris Bank Sampah Indria Jaya	<ul style="list-style-type: none"> a) SK pengelolaan bank sampah/bank sampah b) Pembukuan pengelolaan Bank Sampah Indria Jaya c) Tata tertib Bank Sampah Indria Jaya d) Daftar hadir rapat/pertemuan

		e) Buku kas pengeluaran dan pemasukan Bank Sampah Indria Jaya f) Laporan pertanggungjawaban Bank Sampah Indria Jaya g) Dokumentasi kegiatan-kegiatan Bank Sampah Indria Jaya
--	--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.9.2 Penentuan Informan Penelitian

Peran informan pada penelitian kualitatif memiliki peran signifikan, di mana informan menjadi subjek penelitian yang memberikan informasi terkait dengan topik penelitian. Idrus (2009:91) menyatakan subjek penelitian dapat berupa individu, benda, atau organisme yang menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data penelitian. Informan, dalam konteks penelitian ini, merupakan individu yang memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut Sugiyono (2011:96), yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relevan terkait tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan bank sampah. Berikut daftar narasumber penelitian dalam penelitian ini:

Tabel 1. 4 *Narasumber Penelitian*

No.	Narasumber	Jumlah
1.	Kepala Kelurahan Kalipancur	1 orang
2.	Ketua Bank Sampah	1 orang
3.	PT <i>Indofood</i> Cabang Semarang	1 orang
4.	Yayasan <i>Bintari Fondation</i>	1 orang
5.	Pengepul Sampah	1 orang
6.	Masyarakat Kelurahan Kalipancur (Nasabah dan Non Nasabah Bank Sampah)	3 orang
	Total Informan	8 orang

Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan langsung)

Merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan pencatatan terhadap isu-isu yang terkait dengan kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Indria Jaya Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Teknik ini merupakan cara mendapatkan data dengan pengamatan dan pencatatan unsur dalam objek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami terjadinya hasil wawancara. Teknik observasi akan mengamati aktivitas aktual dan realita di lapangan (Afifudin dan Beni Ahmad, 2012).

Penulis telah melakukan observasi langsung sesuai dengan objek penelitian. Instrumen perolehan data yang dimanfaatkan oleh peneliti dalam proses observasi ini menggunakan kamera dan lembar observasi yang berisi daftar catatan seperti kegiatan

dan program bank sampah, struktur organisasi, pembagian tugas antara pemangku kepentingan, dan dampaknya terhadap aspek lingkungan dan sosial dalam konteks *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kalipancur (Bank Sampah Indria Jaya).

Bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian di bulan September-November 2023 yaitu observasi di Bank Sampah Indria Jaya Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

2. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah suatu proses untuk mengumpulkan keterangan dengan cara bertanya jawab secara langsung antara pewawancara dan informan (Sutikno dan Prosmala, 2020). Menurut Patton dalam (Afifudin dan Beni Ahmad, 2012) wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang mencantumkan isu yang diliput tanpa memperhatikan urutan pertanyaan. Wawancara tersebut juga perlu dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data yang lebih akurat. Wawancara akan dilakukan peneliti dengan aktor yang terlibat kolaborasi.

Peneliti telah berinteraksi dengan para informan dan peneliti memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Untuk mendukung proses wawancara dan merekam data, peneliti

menggunakan beberapa alat bantu seperti daftar pertanyaan wawancara, catatan buku, alat perekam, dan kamera. Melalui wawancara, peneliti telah mendapatkan gambaran pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Indria Jaya, serta mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan *Collaborative Governance* terkait konteks pengelolaan sampah di Bank Sampah Indria Jaya.

Wawancara selama periode penelitian yaitu bulan September-November 2023 dilakukan dengan wawancara informan yang telah terpilih melalui teknik *purposive sampling*.

3. Dokumentasi

Metode studi dokumentasi berperan sebagai pelengkap untuk metode observasi dan wawancara, membantu menyalurkan, meluruskan, atau memperkuat temuan yang ditemukan selama penelitian (Sutikno dan Prosmala, 2020). Dokumen memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait latar belakang penelitian (Afifudin dan Beni Ahmad, 2012).

Pendekatan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait pengelolaan sampah di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Dokumentasi yang telah diperoleh dalam penelitian ini berupa seperti foto kegiatan dan program bank sampah, foto hasil kerajinan-kerajinan dari

sampah, Surat Keputusan Bank Sampah Indria Jaya, nota penjualan dan pembelian bank sampah, laporan keuangan bank sampah, laporan inventaris bank sampah, foto sarana dan prasarana bank sampah, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

1.9.4 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pemeriksaan triangulasi. Triangulasi dijelaskan sebagai suatu proses pengecekan data dari berbagai sumber, dengan metode yang berbeda, serta pada waktu yang berbeda (Satori dan Komariah, 2014:94). Moleong (2014:332) menyatakan triangulasi sebagai metode untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan data dari sumber, metode, dan teori yang berbeda. Satori dan Komariah (2014:170-171) menyebut tiga jenis triangulasi, yakni sumber atau informan, teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang masih terkait satu sama lain untuk meningkatkan kepercayaan penelitian. Triangulasi teknik melibatkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda saat berinteraksi dengan sumber data yang sama. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memeriksa konsistensi, kedalaman, dan kebenaran data.

Adapun triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber atau informan dan triangulasi teknik.

Gambar 1. 5 Daftar informasi penelitian yang telah diuji

No.	Informasi yang dibutuhkan	Teknik Triangulasi
1.	Sejarah berdirinya Bank Sampah Indria Jaya di Kelurahan Kalipancur Kota Semarang	Triangulasi sumber data
2.	Proses tahapan kolaborasi antara pemangku kepentingan di Bank Sampah Indria Jaya	Triangulasi sumber data dan triangulasi teknik
3.	Faktor-faktor keberhasilan kolaborasi antara pemangku kepentingan di Bank Sampah Indria Jaya	Triangulasi sumber data dan triangulasi teknik

Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.9.5 Analisis dan Interpretasi Data

Sugiyono menjelaskan bahwa analisis data merupakan suatu proses sistematis dalam mengambil dan menyusun data dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka. Proses ini melibatkan organisasi data ke dalam kategori tertentu. Peneliti akan melakukan deskripsi data, sintesis, dan identifikasi informasi yang relevan, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti dan pembaca. Teknik analisis data yang diterapkan oleh peneliti bersifat induktif, berdasarkan pada hasil observasi, dan kemudian pengembangannya dapat membentuk hipotesis. Berdasarkan data yang dicari dan diperoleh secara berulang,

memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan hipotesis yang diterima dengan cara triangulasi yang telah disebutkan dalam teori. Menurut Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 2007), terdapat komponen dalam analisis data yaitu:

a) Pengumpulan data

Seluruh data telah dihimpun dan dicatat oleh peneliti secara objektif dan disesuaikan dengan hasil wawancara, observasi, dokumentasi di lapangan.

b) Reduksi data

Analisis data bertujuan untuk mempertajam, mengkategorikan, mengarahkan, dan menghilangkan data yang tidak diperlukan, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan akhir dan verifikasi (Miles & Huberman, 2007). Dalam proses reduksi data, data yang relevan dengan penelitian dicatat secara rinci. Ini melibatkan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memusatkan perhatian pada poin-poin penting dalam penelitian.

Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data penelitian yang saling terkait. Data yang dikelompokkan mencakup informasi tentang proses terjadinya *collaborative governance* dan faktor-faktor keberhasilan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

c) Penyajian data

Data-data yang diperoleh digabungkan berdasarkan sajian informasi yang tersusun sehingga mudah untuk dipahami dan dianalisis. Penyajian data ini bertujuan untuk menemukan pola-pola yang signifikan sehingga memudahkan peneliti untuk memahami gambaran data yang disajikan (Miles & Huberman, 2007).

Penyajian data hasil penelitian ini dilakukan melalui teks naratif yang terdapat dalam Bab 3 Proses dan Faktor-faktor Keberhasilan *Collaborative Governance* Bank Sampah Indria Jaya. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan hasil penelitian secara terperinci.

d) Penarikan kesimpulan

Merupakan langkah akhir yang dilakukan oleh peneliti dengan mengolah data dalam bentuk deskriptif untuk mengungkapkan hasil dari penelitian (Miles & Huberman, 2007). Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama proses observasi di lapangan. Ini karena kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan bukti-bukti yang terungkap di

lapangan sebagai dukungan dalam pengumpulan data. Melalui penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif, memungkinkan peneliti untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini terdapat 2 poin terkait proses dan faktor-faktor keberhasilan kolaborasi dari masing-masing pemangku kepentingan setelah terjadi kesepakatan kolaborasi yang lebih lengkapnya peneliti sajikan pada BAB 4 Penutup. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini